

INOVASI DIGITAL DAN TATA KELOLA POTENSI WILAYAH MELALUI TRANSFORMASI PEMERINTAHAN DIGITAL DI KELURAHAN VIM

Mohammad Reza Fahlevvi¹, Aldo Noviyani Yali Kobak², Eki Marchello Kainakaimu³

^{1,2,3}Institut Pemerintahan Dalam Negeri

ARTICLE INFO

Article history:

Received: May 2025

Revised: May 2025

Accepted: May 2025

Available online

Korespondensi: Email:

¹reza@ipdn.ac.id

²aldonoviyaniyalikobak@gmail.com

³chelloknkm@gmail.com



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Pendidikan Ganesha.

Abstrak

Laporan ini membahas pelaksanaan digitalisasi tata kelola di Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura. Digitalisasi merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi modern, terutama dalam pelayanan publik tingkat kelurahan. Melalui observasi dan keterlibatan langsung dalam kegiatan magang, laporan ini memotret kondisi implementasi teknologi informasi, tantangan yang dihadapi, serta potensi wilayah yang dapat dikembangkan melalui pendekatan digital. Hasil menunjukkan bahwa meskipun infrastruktur dan literasi digital belum sepenuhnya merata, Kelurahan VIM telah menunjukkan komitmen kuat dalam membangun sistem administrasi dan pelayanan publik berbasis teknologi.

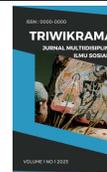
Kata Kunci: Digitalisasi; Kelurahan; Potensi Wilayah; Tata Kelola Pemerintahan

PENDAHULUAN

Era revolusi industri 4.0 telah menandai pergeseran paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan, di mana penggunaan teknologi informasi dan komunikasi menjadi fondasi utama dalam menciptakan layanan publik yang lebih efektif, efisien, transparan, dan responsif. Digitalisasi kini tidak lagi menjadi pilihan, melainkan sebuah keniscayaan bagi setiap unit pemerintahan untuk dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman dan ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi terhadap kualitas layanan.

Kelurahan, sebagai unit pemerintahan terdepan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat, memainkan peran strategis dalam memastikan pelayanan publik berjalan secara optimal. Dalam konteks tersebut, transformasi digital di tingkat kelurahan menjadi penting untuk mendorong tata kelola yang berbasis data, mempercepat proses administrasi, memperkuat akuntabilitas, serta membuka ruang partisipasi warga yang lebih luas melalui teknologi. Pemerintahan digital pada level kelurahan tidak hanya bicara tentang penggunaan perangkat lunak atau sistem elektronik, tetapi juga tentang perubahan budaya kerja, peningkatan literasi digital aparatur, serta adaptasi terhadap sistem informasi yang terintegrasi.

Kelurahan VIM yang berada di Distrik Abepura, Kota Jayapura, merupakan salah satu kelurahan dengan dinamika sosial yang kompleks dan potensi wilayah yang besar. Wilayah ini dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang etnis, agama, dan profesi yang menjadikan keberagaman sebagai kekuatan sekaligus tantangan dalam pelaksanaan pemerintahan. Di sisi lain, letak geografis Kelurahan VIM yang strategis dan dekat dengan pusat pendidikan serta



kawasan ekonomi menjadikannya memiliki potensi besar untuk dikembangkan melalui pendekatan digital yang terstruktur.

Pelaksanaan Magang I di Kelurahan VIM menjadi momen penting untuk menggali secara langsung bagaimana proses digitalisasi pemerintahan dilaksanakan di tingkat kelurahan. Melalui interaksi dengan aparatur, observasi kegiatan, serta keterlibatan dalam aktivitas pelayanan publik, laporan ini akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi digitalisasi, tantangan yang dihadapi, potensi lokal yang dapat dioptimalkan, serta kontribusi nyata praja dalam mendukung transformasi menuju kelurahan digital.

Dengan mengangkat tema "*Memotret Teknologi Informasi Digitalisasi Desa dalam Upaya Pengelolaan Kewenangan dan Potensi Desa dan Kelurahan*", laporan ini tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban akademik atas kegiatan magang, tetapi juga menjadi refleksi kritis atas kondisi riil birokrasi digital di lapangan yang diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran untuk perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Digitalisasi

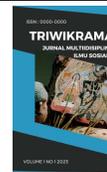
Digitalisasi merupakan proses transformasi dari sistem manual menjadi sistem berbasis digital melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Menurut Nicholas Negroponte (1995) dalam bukunya *Being Digital*, digitalisasi mengacu pada konversi semua bentuk informasi menjadi format digital yang dapat disimpan, diproses, dan dikirimkan secara efisien melalui jaringan komputer. Digitalisasi tidak hanya sebatas peralihan dari dokumen kertas ke dokumen elektronik, tetapi juga mengubah pola interaksi, proses bisnis, hingga pengambilan keputusan.

Dalam konteks pemerintahan, digitalisasi memungkinkan pemangkasan birokrasi yang kompleks, meningkatkan efisiensi layanan publik, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Menurut *World Bank (2021)*, digital government atau pemerintahan digital merupakan strategi untuk memanfaatkan teknologi digital dalam memberikan layanan yang terpusat, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Negara-negara yang telah menerapkan sistem digital secara sistematis menunjukkan peningkatan dalam indeks layanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah.

Konsep Tata Kelola Pemerintahan Digital

Tata kelola pemerintahan digital (digital governance) adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis pada teknologi informasi dengan prinsip partisipatif, transparan, efisien, dan akuntabel. Menurut OECD (2020) dalam laporan *Digital Government Index*, pemerintahan digital ditandai dengan integrasi data dan layanan lintas sektor serta kemampuan beradaptasi terhadap perubahan kebutuhan masyarakat.

Di Indonesia, transformasi menuju pemerintahan digital tertuang dalam Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)*. Regulasi ini menekankan pentingnya interoperabilitas antar-sistem, keamanan data, serta efektivitas layanan publik digital. SPBE diharapkan dapat menciptakan birokrasi yang bersih, efisien, dan responsif dengan penggunaan teknologi yang tepat guna. Penelitian oleh Nugroho & Laksmi (2020) dalam *Jurnal Transformasi Administrasi* menyebutkan bahwa penerapan e-government di tingkat kelurahan dapat mempercepat pelayanan administrasi dasar seperti surat keterangan, data kependudukan, dan pelaporan kegiatan warga, asalkan didukung oleh infrastruktur teknologi dan kapasitas SDM yang memadai.



Konsep Potensi Wilayah

Potensi wilayah adalah keseluruhan sumber daya yang dimiliki suatu wilayah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, sosial-budaya, maupun ekonomi, yang dapat dikembangkan untuk kesejahteraan masyarakat. Menurut Tarigan (2005) dalam bukunya *Perencanaan Pembangunan Wilayah*, pemetaan potensi wilayah menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran.

Badan Pusat Statistik (BPS, 2023) juga menegaskan bahwa data potensi desa dan kelurahan menjadi landasan penting dalam menyusun program pembangunan daerah. Potensi wilayah dapat berupa:

1. Potensi ekonomi, seperti kegiatan UMKM, pertanian, perdagangan, dan jasa;
2. Potensi sosial-budaya, seperti tradisi lokal, komunitas adat, dan kearifan lokal;
3. Potensi geografis, seperti letak strategis atau aksesibilitas terhadap pusat pertumbuhan.

Di era digital, potensi wilayah dapat dimaksimalkan dengan pendekatan berbasis data (*data-driven development*), seperti pemanfaatan sistem informasi geografis (SIG), dashboard ekonomi lokal, dan direktori digital UMKM. Contohnya adalah program *Desa Cerdas* oleh Kementerian Kominfo dan Kementerian Desa (2022), yang mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mengelola potensi dan pelayanan di tingkat desa dan kelurahan.

METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan Magang I di Kelurahan VIM, Distrik Abepura, Kota Jayapura, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai implementasi digitalisasi pemerintahan pada level kelurahan. Pendekatan ini relevan digunakan karena memungkinkan penggambaran fenomena secara langsung berdasarkan kondisi nyata di lapangan, terutama dalam melihat dinamika pelayanan publik berbasis teknologi, pengelolaan kewenangan, dan potensi lokal. Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data meliputi:

1. Observasi Partisipatif

Observasi partisipatif dilakukan dengan terlibat langsung dalam berbagai aktivitas pemerintahan dan pelayanan publik di Kelurahan VIM selama masa magang. Penulis berpartisipasi aktif dalam kegiatan administrasi, seperti pembuatan surat keterangan domisili, pengarsipan dokumen digital, serta pelaporan kegiatan kelurahan. Melalui keterlibatan ini, diperoleh pemahaman nyata mengenai proses kerja, penggunaan perangkat teknologi, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan sistem digital.

Selain itu, observasi juga mencakup pemantauan terhadap interaksi antar-aparatur, pola komunikasi menggunakan media sosial, serta upaya pendataan potensi wilayah dan pelaku UMKM yang dilakukan secara manual maupun semi-digital.

2. Wawancara Informal

Untuk memperdalam hasil observasi, penulis melakukan wawancara informal dengan beberapa aparatur kelurahan, di antaranya Lurah, Sekretaris Kelurahan, Kepala Seksi Pelayanan, dan petugas administrasi. Wawancara ini bersifat terbuka dan berlangsung dalam suasana santai, dengan tujuan mengeksplorasi lebih jauh pemahaman, tantangan, serta aspirasi para pegawai terhadap proses digitalisasi yang sedang dijalankan.

Topik yang digali antara lain adalah kesiapan teknologi, kendala sumber daya manusia, dampak penggunaan sistem digital terhadap pelayanan publik, serta harapan pengembangan ke depan.

3. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen resmi kelurahan seperti laporan kegiatan, data kependudukan, surat keluar-masuk, serta rencana kerja dan program digitalisasi yang tengah disusun. Dokumen tersebut dianalisis untuk melihat konsistensi antara kebijakan dan praktik di lapangan serta untuk menilai sejauh mana digitalisasi sudah diterapkan secara formal dan sistematis. Dengan pendekatan dan metode tersebut, laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran utuh dan faktual mengenai transformasi digital yang tengah berlangsung di Kelurahan VIM serta mengidentifikasi peluang dan tantangan yang perlu direspon secara strategis ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Wilayah Kelurahan VIM

Kelurahan VIM terletak di Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua, dan menempati posisi strategis yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pendidikan serta permukiman padat penduduk. Luas wilayah kelurahan ini diperkirakan sekitar 2,78 km² dengan jumlah penduduk mencapai kurang lebih 6.500 jiwa berdasarkan data tahun 2024. Komposisi penduduk di Kelurahan VIM sangat beragam, terdiri dari masyarakat asli Papua serta warga pendatang dari berbagai daerah di Indonesia yang hidup berdampingan secara harmonis.

Keberagaman etnis, budaya, dan agama yang ada menjadikan Kelurahan VIM sebagai miniatur Indonesia Timur yang dinamis dan kaya akan potensi sosial. Hal ini tercermin dari aktifnya berbagai kegiatan adat, keagamaan, dan kemasyarakatan yang menjadi bagian dari identitas sosial warga setempat. Secara geografis, kelurahan ini berbatasan langsung dengan kelurahan-kelurahan lain yang juga memiliki perkembangan pesat, menjadikannya salah satu titik penting dalam sistem sosial dan ekonomi Distrik Abepura. Keberadaan infrastruktur pendidikan seperti Universitas Cenderawasih dan fasilitas layanan umum lainnya turut memperkuat posisi Kelurahan VIM sebagai kawasan strategis yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan, khususnya melalui pendekatan digitalisasi yang terarah dan berbasis data.

Struktur Organisasi dan Kewenangan Kelurahan

Sebagai unit pemerintahan terendah dalam struktur pemerintahan kota, Kelurahan VIM menjalankan fungsi-fungsi pelayanan publik dan administrasi dasar kepada masyarakat. Struktur kelembagaan kelurahan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Kelurahan. Kelurahan ini dipimpin oleh seorang lurah yang bertanggung jawab langsung kepada camat Distrik Abepura, dan didukung oleh beberapa kepala seksi, antara lain Seksi Pemerintahan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban, serta Seksi Pelayanan.

Masing-masing seksi memiliki peran penting dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, mulai dari penerbitan dokumen kependudukan, fasilitasi kegiatan masyarakat, koordinasi kerja bakti, hingga penanganan laporan gangguan keamanan dan ketertiban lingkungan. Selain aparatur struktural, Kelurahan VIM juga bersinergi dengan lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), yang membantu mendukung pelaksanaan fungsi kelurahan secara partisipatif. Kewenangan kelurahan bersifat atributif dan delegatif dari pemerintah kota. Beberapa di antaranya meliputi pelayanan administrasi dasar seperti surat domisili, surat pengantar pindah, surat keterangan usaha, serta pengelolaan data penduduk. Kewenangan lain juga mencakup pelaksanaan musyawarah pembangunan kelurahan (Musrenbangkel), pelaporan kegiatan masyarakat, serta fasilitasi program bantuan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

Inovasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan

Transformasi digital di Kelurahan VIM menjadi salah satu temuan penting selama pelaksanaan Magang I. Meskipun belum sepenuhnya menyeluruh, berbagai inisiatif digitalisasi telah mulai diterapkan dalam proses administrasi dan pelayanan publik. Salah satu bentuk inovasi yang paling nyata adalah pengarsipan dokumen secara digital. Dokumen-dokumen penting seperti surat domisili, surat pengantar pindah, dan surat keterangan usaha kini mulai diketik, dicetak, dan disimpan dalam format digital melalui perangkat komputer. Ini merupakan langkah awal yang sangat signifikan dalam mengurangi ketergantungan pada dokumen fisik yang selama ini rawan hilang atau rusak.

Selain pengarsipan, pelaporan kegiatan dan penggunaan anggaran kelurahan juga telah mengalami digitalisasi parsial. Laporan bulanan, dokumen pertanggungjawaban kegiatan, serta rekapitulasi dana kelurahan kini dibuat menggunakan perangkat lunak Microsoft Word dan Excel. Format digital ini mempermudah proses editing, dokumentasi, serta pengiriman data ke tingkat distrik atau dinas terkait, walaupun seringkali masih terkendala oleh kualitas jaringan internet yang tidak stabil. Menariknya, Kelurahan VIM juga telah memanfaatkan media sosial sebagai alat komunikasi resmi dengan masyarakat. Grup WhatsApp warga, akun Facebook kelurahan, serta pengumuman digital telah digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai kegiatan gotong royong, pembagian bantuan, jadwal musyawarah, serta instruksi mendadak dari pemerintah kota. Hal ini menunjukkan adanya kesadaran akan pentingnya komunikasi yang cepat, murah, dan menjangkau warga secara langsung.

Peran Digitalisasi dalam Pengelolaan Kewenangan dan Potensi Wilayah

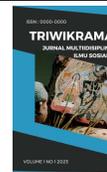
Digitalisasi tidak hanya berdampak pada aspek pelayanan administratif, tetapi juga memberikan pengaruh besar terhadap bagaimana kewenangan kelurahan dijalankan dan bagaimana potensi wilayah dimetakan. Melalui sistem digital yang sedang dibangun, proses verifikasi dokumen warga menjadi lebih cepat dan akurat. Data yang masuk dari warga dapat langsung dicocokkan dengan dokumen digital sebelumnya, sehingga mengurangi risiko kesalahan pencatatan atau pemalsuan data.

Dalam hal pengelolaan potensi wilayah, kelurahan telah memulai proses pendataan pelaku UMKM dan fasilitas sosial secara digital. Penulis, sebagai peserta magang, ikut terlibat dalam pengumpulan data lapangan yang mencakup jenis usaha, lokasi, jumlah tenaga kerja, serta jenis produk yang dijual. Data ini kemudian dikelompokkan berdasarkan wilayah RT/RW dan dirancang untuk diintegrasikan ke dalam *peta potensi wilayah digital*. Pemetaan digital ini berfungsi sebagai instrumen perencanaan pembangunan berbasis spasial, khususnya dalam forum Musrenbang. Dengan adanya peta digital, kelurahan dapat lebih mudah mengidentifikasi lokasi-lokasi yang potensial untuk pengembangan usaha, program pelatihan, atau intervensi sosial. Selain itu, penulis mengusulkan pembentukan *Direktori UMKM Digital*, yaitu kumpulan data pelaku usaha lokal yang dapat dipublikasikan melalui media sosial atau platform resmi pemerintah daerah sebagai bentuk promosi ekonomi digital berbasis komunitas.

Tantangan dalam Implementasi Digitalisasi

Meskipun berbagai inisiatif telah berjalan, proses digitalisasi di Kelurahan VIM masih menghadapi tantangan struktural maupun teknis yang cukup signifikan. Salah satu tantangan utama adalah terbatasnya infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Perangkat komputer yang tersedia masih terbatas jumlahnya dan belum seluruhnya dalam kondisi optimal. Jaringan internet yang digunakan juga sering mengalami gangguan, terutama saat beban kerja tinggi pada jam-jam sibuk.

Selain kendala teknis, tingkat literasi digital aparatur kelurahan juga belum merata. Beberapa pegawai belum terbiasa menggunakan sistem digital secara optimal dan masih bergantung pada cara kerja manual. Hal ini membuat beban kerja digital hanya tertumpu pada



beberapa orang staf yang lebih terbiasa dengan teknologi. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menyebabkan ketimpangan kerja dan memperlambat proses transformasi digital secara menyeluruh. Tantangan lainnya adalah belum adanya sistem digital yang terintegrasi antar-seksi di kelurahan. Masing-masing seksi masih bekerja menggunakan format dan sistem yang berbeda, sehingga terjadi duplikasi data, ketidaksinambungan pelaporan, dan kurangnya koordinasi yang efektif. Hal ini menunjukkan perlunya pengembangan sistem terpadu yang dapat mengintegrasikan berbagai layanan, data, dan proses administrasi dalam satu platform digital yang holistik.

PENUTUP

Pelaksanaan Magang I di Kelurahan VIM memperlihatkan dinamika positif dalam implementasi pemerintahan digital di tingkat akar rumput. Proses digitalisasi yang sedang berlangsung menunjukkan adanya langkah konkret menuju transformasi pelayanan publik yang lebih efisien dan modern. Meskipun masih dihadapkan pada berbagai kendala seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, belum meratanya literasi digital di kalangan aparatur, serta belum adanya sistem digital yang sepenuhnya terintegrasi, namun upaya awal yang telah dilakukan menandakan adanya arah perubahan yang jelas dan berkelanjutan.

Semangat inovasi yang ditunjukkan oleh aparatur kelurahan, serta keterbukaan terhadap penggunaan teknologi informasi dalam tugas-tugas administratif dan komunikasi publik, menjadi modal sosial yang sangat berarti. Hal ini memperlihatkan bahwa perubahan bukan hanya dimulai dari tersedianya teknologi, tetapi juga dari kemauan dan kesiapan sumber daya manusia untuk belajar dan beradaptasi. Oleh karena itu, pengalaman magang ini tidak hanya memberikan pemahaman praktis tentang birokrasi digital, tetapi juga menjadi ruang refleksi terhadap pentingnya dukungan lintas sektor agar transformasi digital di kelurahan dapat terwujud secara menyeluruh dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas layanan kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonius, H. (2020). *Digitalisasi Pemerintahan Desa: Meningkatkan Layanan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Karya Cipta.
- Arifin, A. (2021). *Pembangunan Desa Berbasis Teknologi Informasi*. Jakarta: Pustaka Mandiri.
- BPS (Badan Pusat Statistik). (2021). *Statistik Desa Indonesia 2021*. Jakarta: BPS.
- Cahyono, R., & Sulisty, E. (2019). *Penggunaan Teknologi Informasi dalam Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Press.
- Dewi, R. S. (2022). *Penerapan E-Government di Tingkat Desa dan Kelurahan: Studi Kasus di Beberapa Daerah di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan*. Jakarta: Kemendagri.
- Subekti, T. (2020). *Desa Cerdas: Solusi Pembangunan Berkelanjutan dengan Teknologi Digital*. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, A. (2021). *Inovasi Teknologi dalam Pengelolaan Potensi Desa*. Surabaya: Penerbit Mandala.
- Tim Penulis. (2022). *Transformasi Digital dalam Pembangunan Desa dan Kelurahan*. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Zulkarnain, M. (2020). *Meningkatkan Potensi Desa dengan Teknologi Digital*. Makassar: Penerbit Bumi Aksara.